



Pemkot Makassar Usul APBD Pokok 2025 Rp5,2 T

# Pemkot Makassar Usul APBD Pokok 2025 Rp5,2 T

Turun Dibanding 2024

**MAKASSAR, TRIBUN** - Pemerintah Kota Makassar telah menyerahkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Pokok 2025 kepada DPRD Kota Makassar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan, draft KUA PPAS telah diserahkan sejak dua bulan lalu.

Hanya saja pembahasannya terhambat karena adanya proses penggantian anggota DPRD Kota Makassar dari periode 2019-2024 ke 2024-2025.

Karenanya, Pemkot Makassar harus menunggu rampungannya seluruh struktur di DPRD Makassar, mulai dari pembentukan pimpinan, komisi, hingga alat kelengkapan dewan (AKD).

Zulkifli menjelaskan, Pemkot Makassar bersama Badan Muswarah DPRD Kota

Makassar telah melangsungkan rapat terkait jadwal pembahasan KUA PPAS.

Rencananya, pembahasan akan dimulai pada pekan ini. "Pembahasan mulai tanggal 6 atau 7 November, batas akhir pengesahan APBD pokok paling lambat 30 November," ucap Zulkifli Nanda, Minggu (3/11).

Adapun gambaran umum APBD 2025 Kota Makassar sebesar Rp5,2 triliun. Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD Pokok 2024 sebesar Rp5,73 triliun dan terkoreksi di APBD Perubahan menjadi Rp5,29 triliun.

Turunnya nilai APBD Pokok 2025 berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran. Disamping itu, adanya penyesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah turut mempengaruhi pen-

dapatan di daerah.

"Kita sesuaikan dengan pendapatan karena tahun ini ada perda baru yang ditetapkan, dan waktu (APBD) perubahan pendapatan kita turun karena ada berberapa kewenangan yang diampil alih, dan beberapa yang menyesuaikan dengan UU HKPN terbaru," jelasnya.

Karena itulah Pemkot Makassar perlu menyesuaikan belanja dengan potensi pendapatan di Kota Makassar sekarang ini.

Kata Zulkifli, dalam proses pembahasan tersebut kemungkinan masih ada perubahan-perubahan yang terjadi.

"Ini kan dibuat Pemkot untuk anggaran pokok, termasuk kepentingan DPRD di dalamnya sesuai hasil resek kita bantu masuk di KUA PPAS. Nanti (program) akan jadi pembahasan dengan anggota DPRD yang baru," tuturnya. (ami)

## Pentingnya Monev

**SEMESTARA** itu, Pi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Iwan Rusfiyad Adnan menekankan, penyusunan anggaran harus dilakukan dengan tepat dan terukur, agar prioritas pembangunan dapat terlaksana secara efektif.

Iwan juga menegaskan pentingnya sinergi dan monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan bersama DPRD Kota Makassar sebelum dilakukan pengesahan.

"Kolaborasi antara TAPD dan DPRD akan memastikan anggaran yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat ser-

ta meminimalkan risiko ke depannya," jelasnya. Saya akan berkoordinasi dengan dewan untuk memastikan hal ini," ujarnya.

"Tolong penyusunan anggaran ini dilakukan dengan cermat, disiplin, dan senantiasa memperhatikan aturan yang berlaku, terutama dalam proses pengawasan alokasi dana. Tidak boleh bekerja sendiri, kita harus bermusung dengan kerjasama," ujarnya. (ami)

## 9 OPD dengan realisasi belanja di bawah 40% pada triwulan III 2024

- Dinas Pemuda & Olahraga: 16,55% atau Rp23 miliar dari pagu Rp139 miliar.
- Bagian Hukum: 25% atau Rp1,2 miliar dari pagu Rp4,9 miliar.
- Bagian Administrasi Pembangunan: 30% atau Rp712 juta dari pagu Rp2,3 miliar.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 34,53%
- Dinas Lingkungan Hidup: 18,75% atau Rp38,6 miliar dari pagu Rp205,9 miliar.
- Disperkim: 29,43% atau Rp9,3 miliar dari pagu Rp31,4 miliar.
- Dinas Pekerjaan Umum: 30,86%
- Bagian Perekonomian: 32,12%
- Dinas Penataan Ruang: 38,95%

